

# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



**diskominfo**  
Majalengka

**DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Jalan KH. Abdul Halim No.97- Majalengka Telp (0233) 8292292  
(email) : [diskominfo@majalengkakab.go.id](mailto:diskominfo@majalengkakab.go.id) (Website) : <https://diskominfo.majalengkakab.go.id>



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jalan KH. Abdul Halim No.97- Majalengka Telp (0233) 8292292  
( email ) : [Diskominfo@majalengkakab.go.id](mailto:Diskominfo@majalengkakab.go.id). ( Website ) : <https://diskominfo.majalengkakab.go.id>.

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NOMOR 100.33.3/ 31 / Diskominfo/2025/M**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2025 – 2029**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Dokumen Renstra OPD Kabupaten Majalengka Tahun 2019 - 2023, yang merupakan pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas serta capaian kinerja (outcome), telah habis masa berlakunya
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025 - 2029 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2024 tentang RPJPD Jawa Barat 2025 – 2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025- 2045.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA** : Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Tahun 2025 - 2029 pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 29 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Majalengka,



**IRWAN, ST., MM**

**Pembina Tingakt I**

**NIP. 19791014 201001 1 006**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jalan KH. Abdul Halim No.97- Majalengka Telp (0233) 8292292  
( email ) : [Diskominfo@majalengkakab.go.id](mailto:Diskominfo@majalengkakab.go.id). ( Website ) : <https://diskominfo.majalengkakab.go.id>.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2025-2029**

**NOMOR : M-100.3.3 / 22.1 / Diskominfo / 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN**  
**MAJALENGKA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>		<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Dinas	:	Penanggungjawab	
2	Sekretaris Dinas	:	Ketua Pelaksana	
3	Tim Perencana Evaluasi dan Pelaporan (PEP)	:	Sekretaris	
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	:	Anggota	
5	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	:	Koordinator Bidang IKP	
6	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	:	Anggota	
7	Pengelola Data dan Informasi	:	Anggota	
8	Kepala Bidang Informatika	:	Koordinator Bidang Informatika	
9	Pranata Komputer Ahli Muda	:	Anggota	
10	Analisis Sistem Informasi	:	Anggota	
11	Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	:	Koordinator Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	
12	Kasi Persandian	:	Anggota	
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	:	Anggota	
14	Statistisi Ahli Pertama	:	Anggota	

Ditetapkan di Majalengka

Tanggal 3 Maret 2025

  
Kepala  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Majalengka  
**H. GATOT SULAEMAN, AP,M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1760528 199412 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Majalengka, Kami bersyukur pula bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kominfo ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya serta untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap visi, misi dan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Majalengka. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Penyusunannya Renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural, fungsional Tertentu dan Fungsional umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja kerasnya sehingga berhasil menyusun Rencana Statergis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan baik.



Besar harapan kami bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka melalui program-program yang telah disusun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya dapat membawa Kabupaten Majalengka menjadi Kabupaten yang Langkung Sae dan terdepan di Provinsi Jawa Barat.

Majalengka, Agustus 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Majalengka,



**IRWAN, ST., MM**  
**Pembina Tingakt I**

**NIP. 19791014 201001 1 006**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	41
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	43
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah .....	43
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	47
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 .....	47
3.2. Sasaran Perangkat Daerah.....	47
3.3. Strategi Perangkat Daerah.....	49
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	54
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan .....	54
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	106
4.2.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.....	106
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah .....	108
BAB V PENUTUP .....	110
DAFTAR LAMPIRAN.....	111



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1 Struktur organisasi Kepegawaian Diskominfo berdasarkan Jabatan .....	18
Tabel 2.1.2.2 Struktur organisasi Kepegawaian Diskominfo berdasarkan Pendidikan .....	19
Tabel 2.1.2.3 Inventaris Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalengka.....	19
Tabel 2.1.2.4 Data domain Website OPD dan Kecamatan di Kabupeten Majalengka .....	22
Tabel 2.1.2.5 Data layanan system elektronik Perangkat Daerah di Kabupeten Majalengka .....	24
Tabel 2.1.2.6 Data Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka...	28
Tabel 2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka .....	40
Tabel 2.2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD .....	48
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka .....	49
Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	50
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD .....	61
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	78
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	104
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	107
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	7
Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka .....	17



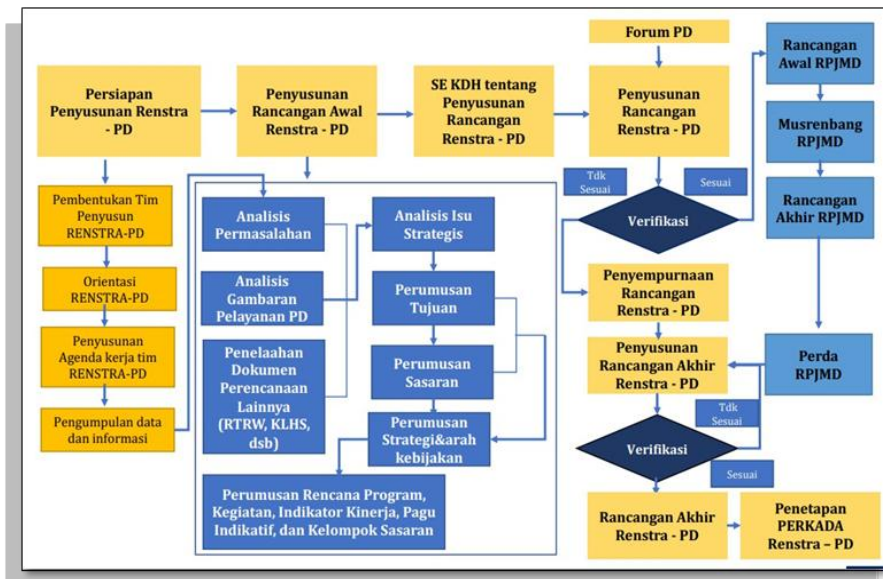
## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 secara khusus mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2025-2029, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa barat Tahun 2025-2029.

Adapun Bagan Alur Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri No.86 Tahun 2017

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)



6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaran Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)



15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307)
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262)
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045



27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Nomor 1);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yaitu menjadi pedoman strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diintegrasikan dengan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan daerah kedalam program dan kegiatan sektor komunikasi dan informatika serta sebagai kerangka arah pembangunan untuk tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 sehingga pembangunan Kabupaten Majalengka dapat berjalan berkesinambungan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi arah dan prioritas pembangunan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Sektorial dan Persandian agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka.
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memastikan keterpaduan dan kesesuaian pembangunan.
3. Menjadi dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Dinas untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.



4. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja tahunan (Rencana Kerja) Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 5 tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran Layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan serta memuat Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat Gambaran Tujuan, Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dan Kebijakan Perangkat Daerah.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Gambaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang didalamnya mengemukakan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tahun 2025-2029

##### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari Penyusunan dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan ditetapkan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya membawa dampak yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, terutama prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan informasi publik serta pengembangan sistem digital pemerintahan. Diskominfo berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Diskominfo Kabupaten Majalengka menyelenggarakan berbagai layanan, di antaranya adalah pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah (*e-Government*), penguatan infrastruktur jaringan dan pusat data, pengelolaan layanan publik berbasis digital, diseminasi informasi publik melalui berbagai media. Selain itu, Diskominfo juga berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi publik oleh perangkat daerah, peningkatan literasi digital masyarakat serta penyelenggaraan statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah daerah.

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, yang secara rinci diatur juga dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja



Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
2. Pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
3. Pengelolaan informasi publik dan komunikasi publik.
4. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan statistik sektoral.
5. Pelaksanaan pengamanan informasi dan persandian.
6. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai berikut;

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik sektoral.
2. Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika
3. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan organisasi Dinas.
4. Pengelolaan dan diseminasi informasi publik melalui berbagai media, termasuk media sosial dan media massa
5. Pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
6. Fasilitasi pelaksanaan program di bidang Kesekretariatan, Statistik Sektoral, Persandian, Informasi dan Komunikasi Publik, serta Informatika.
7. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka memiliki susunan Organisasi sebagai berikut :



## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sektoral yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan, dan koordinasi tugas bidang-bidang secara terpadu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

## 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **4. Bidang Pengelolaan Infomasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Pengelolaan Infomasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media, Seksi Pengelolaan Informasi Publik, dan Seksi Desiminasi Informasi Publik, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Infomasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **5. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana operasional dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar operasional prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Informatika, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



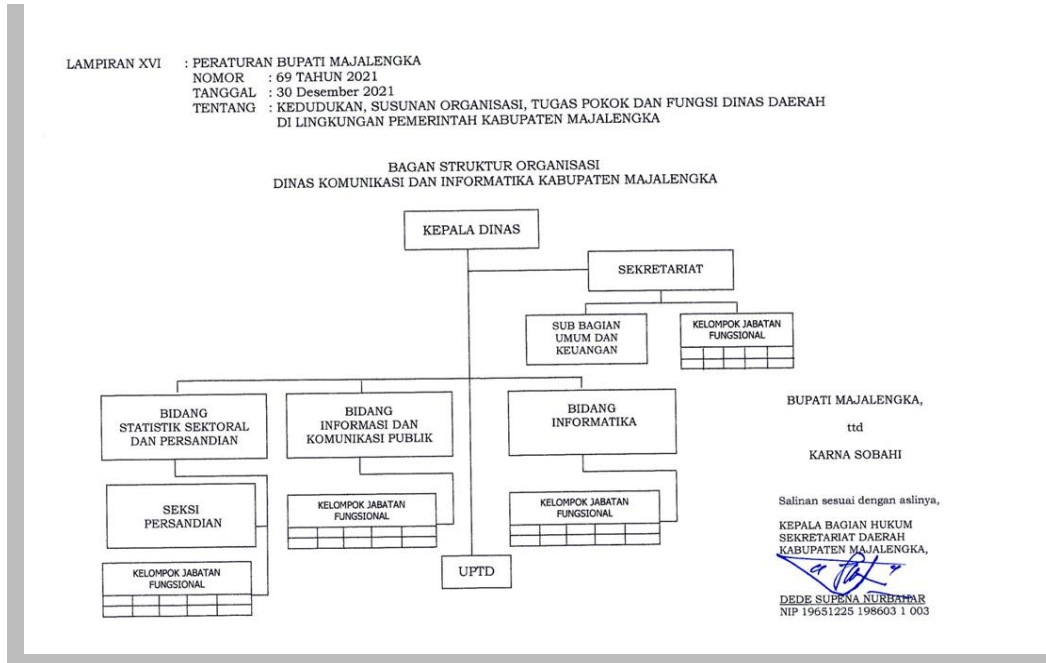
## 6. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian

Bidang Statistik sektoral dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok Merencanakan operasional, merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan urusan Bidang Statistik Sektoral dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagaimana Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



*Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Majalengka*

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara umum, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana kerja, serta dukungan anggaran. SDM memiliki peran sentral sebagai penggerak utama dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik dari sisi pendidikan, kompetensi teknis, maupun pengalaman kerja, sehingga mampu menjawab tantangan perencanaan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk pencapaian sasaran dan tujuan, serta indikator kinerja dibantu oleh Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan ditunjang pula oleh unsur fungsional, dengan jumlah Pegawai sebanyak 36 orang. Berikut ini data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025. Lihat pada tabel di bawah ini.



## Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Tabel 2.1.2.1 Struktur organisasi Kepegawaian Diskominfo berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon IIa	1	-	1
2	Eselon IIIa	1	-	1
3	Eselon IIIb	2	1	3
4	Eselon Iva	1	1	2
5	Eselon IVb	2	-	2
6	Fungsional	9	6	15
7	PPPK	8	4	12
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>12</b>	<b>36</b>

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalengka Tahun 2025



**Rekapitulasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025**

*Tabel 2.1.2.2 Struktur organisasi Kepegawaian Diskominfo berdasarkan Pendidikan*

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				
	S2	S1	DIPLOMA	SMA	SMP
Kepala	1	-	-	-	-
Sekretariat	1	6	1	3	-
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	5	-	5	-
Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	7	-	-	-
Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	-	5	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	4	23	1	8	-

*Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalengka Tahun 2025*

Terkait dengan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang, dikarenakan dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Majalengka adalah ruangan kantor di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dilengkapi 1 (Satu) ruang rapat. Selain itu, terdapat beberapa ruang lain yang digunakan untuk bidang-bidang diantaranya Bidang Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Informatika, Bidang Statistik Sektoral dan persandian, serta 1 (satu) ruang Server.

Berikut daftar Barang Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang mendukung kinerja untuk menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1.2.3 Inventaris Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalengka*

No	Jenis Barang	Banyaknya
1	Sepeda Motor	4
2	Box Kabin	1
3	GPS	4



4	Meja Kerja Kepala Dinas	1
5	Lemari Arsip Kepala Dinas	1
6	Kursi Kerja Kepala Dinas	1
7	Kursi Hadap Kepala Dinas	2
8	Sice/Kursi Tamu Kepala Dinas	1
9	Meja Kerja Sekretaris	1
10	Lemari Arsip Sekretaris	1
11	Kursi Kerja Sekretaris	1
12	Kursi Hadap Sekretaris	2
13	Sice/Kursi Tamu Sekretaris	1
14	Meja Kerja Kepala Bidang	2
15	Lemari Arsip Kabid	2
16	Kursi Kerja Kepala Bidang	2
17	Kursi Hadap Kepala Bidang	4
18	Sice/Kursi Tamu Kepala Bidang	2
19	Meja Kerja Kasubbag	2
20	Kursi Kerja Kasubag	2
21	Filling Kabinet Kasubbag	2
22	Meja Kerja Kasi/Kasubbid	4
23	Kursi Kerja Kasi/Kasubbid	4
24	Filling Kabinet Kasi/Kasubbid	4
25	AC	12
26	Lemari Arsip	1
27	Meja Resepsionis	1
28	Antenna Pemancar	1
29	Radio Repeater	3
30	Radio Acces Poin	9
31	Meja Siaran	3
32	UPS / Stabilizer	5
33	Kamera Video	2
34	Tabung Pemadam Kebakaran	1
35	Tiang Pemancar Koneksi SKPD	8
36	Meja/Kursi Tamu	1
37	Meja Kerja	38
38	Lemari Arsip Background	13
39	Pesawat Pemancar Radio	2
40	Tower + Peripheral	3
41	Mixer Radio	1
42	Kamera Digital	1
43	Proyektor	1
44	Wireles Portable	1
45	Salon Aktif	1
46	Amplifier	1
47	Tower Telekomunikasi	2
48	Kamera Teleconference	29
49	Kamera CCTV	12
50	Tower Telekomunikasi Inter Koneksi SKPD	7
51	Tripod Camera (Discover Profesional Tripod)	1
52	Tripod Camera (SC Gimbal Stabilizer Pro)	1
53	Michrophone	4
54	Web Camera	1



55	Audio Mixer 16 Chanel Set	1
56	Headphone Behringer C1 XLR	1
57	Notebook	11
58	Komputer PC	21
59	Komputer Mainframe/Server	4
60	Jaringan Komputer	23
61	Sekat Ruang/Partisi	1
62	Laptop	6
63	Printer	18
64	Router Mikrotik	4
65	Peralatan Media Center CPU (Peralatan Personal Komputer)	1
66	Storage Modul ( NAS )	1

Di samping itu, infrastruktur komunikasi dan informatika sangat vital sebagai prasarana untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu juga ditunjang oleh peningkatan kualitas kinerja SDM melalui kegiatan bimbingan teknis secara berkala. Media website Perangkat Daerah sangat dibutuhkan bagi masyarakat dalam rangka memudahkan akses partisipasi pembangunan dalam berbagai bidangnya. Bagi Perangkat Daerah, website merupakan sarana ekspos kinerja kepada berbagai pihak terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan.

Berikut ini adalah data domain website di beberapa Kecamatan dan Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka.



Data Domain Website OPD dan Kecamatan di Kabupaten Majalengka

Tabel 2.1.2.4 Data domain Website OPD dan Kecamatan di Kabupaten Majalengka

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	<a href="http://setda.majalengkakab.go.id">http://setda.majalengkakab.go.id</a>
2	Sekretariat DPRD	<a href="http://setwan.majalengkakab.go.id">http://setwan.majalengkakab.go.id</a>
3	Inspektorat	<a href="http://inspektorat.majalengkakab.go.id">http://inspektorat.majalengkakab.go.id</a>
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<a href="http://bappelitbangda.majalengkakab.go.id">http://bappelitbangda.majalengkakab.go.id</a>
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<a href="http://bkad.majalengkakab.go.id">http://bkad.majalengkakab.go.id</a>
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<a href="http://bkpsdm.majalengkakab.go.id">http://bkpsdm.majalengkakab.go.id</a>
7	Dinas Pendidikan	<a href="http://disdik.majalengkakab.go.id">http://disdik.majalengkakab.go.id</a>
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	<a href="http://distankan.majalengkakab.go.id">http://distankan.majalengkakab.go.id</a>
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<a href="http://dinasperdagangan.majalengkakab.go.id">http://dinasperdagangan.majalengkakab.go.id</a>
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<a href="http://dpmd.majalengkakab.go.id">http://dpmd.majalengkakab.go.id</a>
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	<a href="http://dp3akb.majalengkakab.go.id">http://dp3akb.majalengkakab.go.id</a>
12	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah	<a href="http://disnakerin.majalengkakab.go.id">http://disnakerin.majalengkakab.go.id</a>
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<a href="http://putr.majalengkakab.go.id">http://putr.majalengkakab.go.id</a>
14	Dinas Sosial	<a href="http://dinsos.majalengkakab.go.id">http://dinsos.majalengkakab.go.id</a>
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<a href="http://dk2ukm.majalengkakab.go.id">http://dk2ukm.majalengkakab.go.id</a>
16	Dinas Lingkungan Hidup	<a href="http://dlh.majalengkakab.go.id">http://dlh.majalengkakab.go.id</a>
17	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga	<a href="http://rsudtalaga.majalengkakab.go.id">http://rsudtalaga.majalengkakab.go.id</a>
18	Dinas Kesehatan	<a href="http://dinkes.majalengkakab.go.id">http://dinkes.majalengkakab.go.id</a>
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<a href="http://dpmptsp.majalengkakab.go.id">http://dpmptsp.majalengkakab.go.id</a>
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	<a href="http://disarpusda.majalengkakab.go.id">http://disarpusda.majalengkakab.go.id</a>
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<a href="http://disparbud.majalengkakab.go.id">http://disparbud.majalengkakab.go.id</a>
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	<a href="http://dispورا.majalengkakab.go.id">http://dispورا.majalengkakab.go.id</a>
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	<a href="http://diskominfo.majalengkakab.go.id">http://diskominfo.majalengkakab.go.id</a>
24	Dinas Perhubungan	<a href="http://dishub.majalengkakab.go.id">http://dishub.majalengkakab.go.id</a>
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<a href="http://pppsda.majalengkakab.go.id">http://pppsda.majalengkakab.go.id</a>
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<a href="http://disdukcapil.majalengkakab.go.id">http://disdukcapil.majalengkakab.go.id</a>
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<a href="http://satpolpp.majalengkakab.go.id">http://satpolpp.majalengkakab.go.id</a>
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka	<a href="http://bpbd.majalengkakab.go.id">http://bpbd.majalengkakab.go.id</a>
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<a href="http://bakesbangpol.majalengkakab.go.id">http://bakesbangpol.majalengkakab.go.id</a>
30	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	<a href="http://rsudmajalengka.majalengkakab.go.id">http://rsudmajalengka.majalengkakab.go.id</a>
31	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	<a href="http://rsudcideres.majalengkakab.go.id">http://rsudcideres.majalengkakab.go.id</a>
32	Kecamatan Majalengka	<a href="http://majalengka.kec.majalengkakab.go.id">http://majalengka.kec.majalengkakab.go.id</a>



33	Kecamatan Cigasong	<a href="http://cigasong.kec.majalengkakab.go.id">http://cigasong.kec.majalengkakab.go.id</a>
34	Kecamatan Panyingkiran	<a href="http://panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id">http://panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id</a>
35	Kecamatan Kadipaten	<a href="http://kadipaten.kec.majalengkakab.go.id">http://kadipaten.kec.majalengkakab.go.id</a>
36	Kecamatan Dawuan	<a href="http://dawuan.kec.majalengkakab.go.id">http://dawuan.kec.majalengkakab.go.id</a>
37	Kecamatan Kasokandel	<a href="http://kasokandel.kec.majalengkakab.go.id">http://kasokandel.kec.majalengkakab.go.id</a>
38	Kecamatan Kertajati	<a href="http://kertajati.kec.majalengkakab.go.id">http://kertajati.kec.majalengkakab.go.id</a>
39	Kecamatan Jatitujuh	<a href="http://jatitujuh.kec.majalengkakab.go.id">http://jatitujuh.kec.majalengkakab.go.id</a>
40	Kecamatan Ligung	<a href="http://ligung.kec.majalengkakab.go.id">http://ligung.kec.majalengkakab.go.id</a>
41	Kecamatan Jatiwangi	<a href="http://jatiwangi.kec.majalengkakab.go.id">http://jatiwangi.kec.majalengkakab.go.id</a>
42	Kecamatan Palasah	<a href="http://palasah.kec.majalengkakab.go.id">http://palasah.kec.majalengkakab.go.id</a>
43	Kecamatan Sumberjaya	<a href="http://sumberjaya.kec.majalengkakab.go.id">http://sumberjaya.kec.majalengkakab.go.id</a>
44	Kecamatan Leuwimunding	<a href="http://leuwimunding.kec.majalengkakab.go.id">http://leuwimunding.kec.majalengkakab.go.id</a>
45	Kecamatan Rajagaluh	<a href="http://rajagaluh.kec.majalengkakab.go.id">http://rajagaluh.kec.majalengkakab.go.id</a>
46	Kecamatan Sindangwangi	<a href="http://sindangwangi.kec.majalengkakab.go.id">http://sindangwangi.kec.majalengkakab.go.id</a>
47	Kecamatan Sindang	<a href="http://sindang.kec.majalengkakab.go.id">http://sindang.kec.majalengkakab.go.id</a>
48	Kecamatan Sukahaji	<a href="http://sukahaji.kec.majalengkakab.go.id">http://sukahaji.kec.majalengkakab.go.id</a>
49	Kecamatan Maja	<a href="http://maja.kec.majalengkakab.go.id">http://maja.kec.majalengkakab.go.id</a>
50	Kecamatan Argapura	<a href="http://argapura.kec.majalengkakab.go.id">http://argapura.kec.majalengkakab.go.id</a>
51	Kecamatan Malausma	<a href="http://malausama.kec.majalengkakab.go.id">http://malausama.kec.majalengkakab.go.id</a>
52	Kecamatan Talaga	<a href="http://talaga.kec.majalengkakab.go.id">http://talaga.kec.majalengkakab.go.id</a>
53	Kecamatan Cikijing	<a href="http://cikijing.kec.majalengkakab.go.id">http://cikijing.kec.majalengkakab.go.id</a>
54	Kecamatan Banjaran	<a href="http://banjaran.kec.majalengkakab.go.id">http://banjaran.kec.majalengkakab.go.id</a>
55	Kecamatan Bantarujeg	<a href="http://bantarujeg.kec.majalengkakab.go.id">http://bantarujeg.kec.majalengkakab.go.id</a>
56	Kecamatan Lemahsugih	<a href="http://lemahsugih.kec.majalengkakab.go.id">http://lemahsugih.kec.majalengkakab.go.id</a>
57	Kecamatan Cingambul	<a href="http://cingambul.kec.majalengkakab.go.id">http://cingambul.kec.majalengkakab.go.id</a>

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalengka 2025



Berikut ini adalah data layanan sistem elektronik di Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2025

Tabel 2.1.2.5 Data layanan system elektronik Perangkat Daerah di Kabupeten Majalengka

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	OPD Penanggungjawab	Alamat Web
1.	BANGKIT	Aplikasi Indentifikasi keluarga miskin untuk ketepatan program dan bantuan	Dinas Kominfo	<a href="http://bangkit.majalengkakab.go.id">http://bangkit.majalengkakab.go.id</a>
2.	ERAHARJA	Renumerasi dan Kinerja	Dinas Kominfo	<a href="https://eraharja.majalengkakab.go.id/">https://eraharja.majalengkakab.go.id/</a>
3.	PPID	Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Dinas Kominfo	<a href="http://ppid.majalengkakab.go.id/">http://ppid.majalengkakab.go.id/</a>
4.	ESIGN	Aplikasi untuk Penerapan Tanda Tangan Elektronik Berbasis Cloud	Dinas Kominfo	<a href="https://esign.majalengkakab.go.id/">https://esign.majalengkakab.go.id/</a>
5.	Sisumaker (Sistem Surat Masuk Keluar)	Salah satu sub sistem dari perkantoran elektronik di Setda yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan komputer dan aplikasi web based yang dapat memproses data naskah dinas dalam program manajemen basis data.	Diskominfo	<a href="https://sisumaker.majalengkakab.go.id">https://sisumaker.majalengkakab.go.id</a>
6.	SATU DATA	Platform untuk pengelolaan dan berbagi pakai data antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka	Dinas Kominfo	<a href="https://satudata.majalengkakab.go.id/login">https://satudata.majalengkakab.go.id/login</a>
7.	Open Data Majalengka	Pengelolaan Data Sektoral Kab. Majalengka	Dinas Kominfo	<a href="http://opendata.majalengkakab.go.id/">http://opendata.majalengkakab.go.id/</a>
8.	SMTPP	Pengelolaan Email SKPD Daerah	Dinas Kominfo	<a href="http://smtp.majalengkakab.go.id">http://smtp.majalengkakab.go.id</a>
9.	SATU PETA	Portal untuk mengelola dan berbagi pakai data geospasial di	Dinas Kominfo	<a href="https://satupeta.majalengkakab.go.id/">https://satupeta.majalengkakab.go.id/</a>



		Majalengka		
10.	SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo	<a href="http://spbe.majalengkakab.go.id">http://spbe.majalengkakab.go.id</a>
11.	SIDOKPIM	Sistem Informasi Dokumentasi Pimpinan	Setda	<a href="http://sidokpim.majalengkakab.go.id">http://sidokpim.majalengkakab.go.id</a>
12.	SIOMPIM	Aplikasi surat menyurat dan agenda pimpinan	Setda	<a href="http://siompim.majalengkakab.go.id">http://siompim.majalengkakab.go.id</a>
13.	SIPEKA	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Setda	Setda	<a href="http://sipeka.majalengkakab.go.id">http://sipeka.majalengkakab.go.id</a>
14.	E-SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Bag, Organisasi (SETDA)	<a href="http://e-sakip.majalengkakab.go.id/">http://e-sakip.majalengkakab.go.id/</a>
15.	JDIH	Sistem Informasi Hukum	Setda	<a href="http://jdih.majalengkakab.go.id/">http://jdih.majalengkakab.go.id/</a>
16.	SIMONEVYANLIK	Sistem Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Majalengka	Setda	<a href="http://simonevyanlik.majalengkakab.go.id">http://simonevyanlik.majalengkakab.go.id</a>
17.	SIPMAGER	Layanan Informasi Magang Kerja	Setda	<a href="http://sipmager.majalengkakab.go.id">http://sipmager.majalengkakab.go.id</a>
18.	SAMARA	Sistem Kepegawaian	BKPSDM	<a href="http://samara.majalengkakab.go.id">http://samara.majalengkakab.go.id</a>
19.	EKASEP	Aplikasi Surat Tandatangani Elektronik	BKPSDM	<a href="http://ekasep.majalengkakab.go.id">http://ekasep.majalengkakab.go.id</a>
20.	ABSENSI	Absensi Pegawai	BKPSDM	<a href="http://absensi.majalengkakab.go.id">http://absensi.majalengkakab.go.id</a>
21.	SIRANCAGE	Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi	BKPSDM	<a href="https://sirancage.majalengkakab.go.id/">https://sirancage.majalengkakab.go.id/</a>
22.	REKONDISI	Ruang Edukasi Online Dalam Meningkatkan Kompetensi	BKPSDM	<a href="http://rekondisi.majalengkakab.go.id">http://rekondisi.majalengkakab.go.id</a>
23.	SILIH ASUH RAHARJA	Sistem Informasi Lingkungan Hidup Aduan Masyarakat dan Isu Lingkungan Hidup	DLH	<a href="http://silihasuhradharja.majalengkakab.go.id">http://silihasuhradharja.majalengkakab.go.id</a>
24.	PBB Online	Cek Tagihan PBB	BAPENDA	<a href="http://pbb.majalengkakab.go.id">http://pbb.majalengkakab.go.id</a>
25.	BPHTB ONLINE	Pajak Online	BAPENDA	<a href="http://bphtb.majalengkakab.go.id">http://bphtb.majalengkakab.go.id</a>
26.	CEK TUNGGAKAN	Aplikasi Tagihan SPPT PBB	BAPENDA	<a href="http://cek-tunggakan.majalengkakab.go.id">http://cek-tunggakan.majalengkakab.go.id</a>
27.	PDL Majalengka	9 Pajak Daerah Online	BAPENDA	<a href="http://pdl.majalengkakab.go.id">http://pdl.majalengkakab.go.id</a>
28.	INFRAMAP	Sistem Informasi	Bappedalitbang	<a href="http://inframap.majalengkakab.go.id">http://inframap.majalengkakab.go.id</a>



		Data Infrastruktur Berbasis Web GIS		
29.	E-MONEV	Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka	Bappedalitbang	<a href="http://emonev.majalengkakab.go.id">http://emonev.majalengkakab.go.id</a>
30.	i-LITBANG	Aplikasi Penelitian dan pengembangan daerah	Bappedalitbang	<a href="https://i-litbang.majalengkakab.go.id/">https://i-litbang.majalengkakab.go.id/</a>
31.	SILANDAK	Sistem Informasi Laporan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Majalengka	Bappedalitbang	<a href="https://silandak.majalengkakab.go.id/">https://silandak.majalengkakab.go.id/</a>
32.	SI BEUNTEUR GEULIS	Sistem Informasi Pembukuan untuk Entrepreneur Gesit, Ulet dan Sukses	DK2UKM	<a href="http://sibeunteurgeulis.majalengkakab.go.id">http://sibeunteurgeulis.majalengkakab.go.id</a>
33.	MPP	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Majalengka	SPMPTSP	<a href="http://mpp.majalengkakab.go.id">http://mpp.majalengkakab.go.id</a>
34.	MADE IN MAJALENGKA	informasi tentang pariwisata di Majalengka	Disparbud	<a href="http://madeinmajalengka.majalengkakab.go.id">http://madeinmajalengka.majalengkakab.go.id</a>
35.	SITILAWAS	Sistem informasi tindak lanjut dan pengawasan	Inspektorat	<a href="http://sitilawas.majalengkakab.go.id">http://sitilawas.majalengkakab.go.id</a>
36.	SISKEUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa	DPMD	<a href="https://siskeudes.majalengkakab.go.id/">https://siskeudes.majalengkakab.go.id/</a>
37.	SIPAMONG	Pendataan Pamong Desa	DPMD	<a href="https://sipamong.majalengkakab.go.id/">https://sipamong.majalengkakab.go.id/</a>
38.	BADAI	Aplikasi Arsip Data dan Informasi	BKAD	<a href="http://badai.majalengkakab.go.id">http://badai.majalengkakab.go.id</a>
39.	SIPEPEDT	Aplikasi Bantuan Dana Transfer, Bankeu	BKAD	<a href="http://sipepedt.majalengkakab.go.id">http://sipepedt.majalengkakab.go.id</a>
40.	BALANTIK	Layanan utama untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dan fitur Desa	Disperindag	<a href="http://balantik.majalengkakab.go.id">http://balantik.majalengkakab.go.id</a>
41.	Go CUAN	Layanan akses pelayanan dan fitur Desa	Disperindag	<a href="http://go-cuan.majalengkakab.go.id">http://go-cuan.majalengkakab.go.id</a>
42.	METAFORA SD	Manajemen Data dan Informasi Sekolah Dasar	Disdik	<a href="http://metaforasd.majalengkakab.go.id">http://metaforasd.majalengkakab.go.id</a>
43.	JDIH DPRD	Sistem Regulasi Perda, Perbup dll	Setwan	<a href="http://idih-dprd.majalengkakab.go.id">http://idih-dprd.majalengkakab.go.id</a>



44.	SIMPEKA	Sistem Informasi Kearsipan	Disarpusda	<a href="http://simpeka.majalengkakab.go.id">http://simpeka.majalengkakab.go.id</a>
-----	---------	----------------------------	------------	---

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalengka 2025

Dalam lingkup pengelolaan teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka memiliki fokus pada pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika, pengembangan server pusat informasi, pembinaan kapasitas SDM pengelola TI, serta pengembangan layanan komunikasi dua arah (video conference). Salah satu aspek penting dalam pengawasan infrastruktur adalah identifikasi dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi oleh provider seluler.

Mengacu pada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, menara telekomunikasi merupakan infrastruktur vital yang harus memenuhi ketentuan tata ruang dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 353 titik menara telekomunikasi dari 16 provider telah berdiri di wilayah Kabupaten Majalengka, mengenai datanya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.1.2.6 Data Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka

**JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI  
KABUPATEN MAJLENGKA**

NO	PROVIDER	JUMLAH MENARA
1	PT. TELKOMSEL	1
2	PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG)	106
3	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)	70
4	PT. XL AXIATA	2
5	PT. EPID MENARA ASSETCO EMA	8
6	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP)	9
7	PT. SARANA INTI PERSADA (SIP)	6
8	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATTEL)	117
9	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA (IBS)	11
10	PT. INDOSIAR	1
11	PT. CENTRATAMA INDONESIA	9
12	PT. LASMANA SWASTI PRASHIDA	5
13	PT. PERSADA SOKKA	1
14	PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	5
15	PT. PERMATA KARYA PERDANA	1
16	PT. ERA BANGUN TOWERINDO	1
<b>TOTAL</b>		<b>353</b>

**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA  
PT. TELEKOMUNIKASI SELULER**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	TELKOMSEL	DAWUAN	Bojong Cideres	2001	72



**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA  
PT. TOWER BERSAMA GROUP**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	TBG	Majalengka	Majalengka Wetan	1998	72
2	TBG	DAWUAN	Genteng	2004	70
3	TBG	SUKAHAJI	Cikoneng	2004	70
4	TBG	BANTARUJEG	Babakan Sari	2005	70
5	TBG	JATITUJUH	Jatitengah	2005	70
6	TBG	JATIWANGI	Blok Pajaten	2005	55
7	TBG	KERTAJATI	Dusukan Babakan	2005	72
8	TBG	LEMAHSUGIH	Lemahputih	2005	70
9	TBG	LEUWIMUNDING	Blok Rebo	2005	70
10	TBG	LIGUNG	Bantar Waru	2005	70
11	TBG	SUKAHAJI	Tanjungsari	2005	70
12	TBG	ARGAPURA	Argalingga	2007	72
13	TBG	BANJARAN	Jami Demang	2007	72
14	TBG	CIGASONG	Pasukan Sindang Kasih	2007	72
15	TBG	KASOKANDEL	Leuwi Kidang	2007	72
16	TBG	JATIWANGI	Brujul Wetan	2007	72
17	TBG	KADIPATEN	Heuleut	2007	72
18	TBG	KADIPATEN	Babakan Anyar	2007	72
19	TBG	KERTAJATI	Blok Desa	2007	72
20	TBG	KERTAJATI	Pasir Ipis	2007	72
21	TBG	MAJALENGKA	Sidamukti	2007	72
22	TBG	PALASAH	Waringin	2007	72
23	TBG	SINDANGWANGI	Sindangwangi	2007	52
24	TBG	SINDANG	Indrakila	2007	72
25	TBG	RAJAGALUH	Rajagaluhlor	2007	62
26	TBG	SUMBERJAYA	Paningkiran	2007	42
27	TBG	JATIWANGI	Sutawangi	2007	70
28	TBG	DAWUAN	Genteng	2007	72
29	TBG	Cingambul	Cingambul/BDG_RepB2.12	2007	72
30	TBG	CIGASONG	Kutamunggu	2008	42
31	TBG	JATITUJUH	Sumber Kulon	2008	52
32	TBG	LIGUNG	Sukawera	2008	42
33	TBG	TALAGA	Gunung Manik	2008	72
34	TBG	TALAGA	Gunung Manik	2010	52
35	TBG	Argapura	Sadasari	2010	52
36	TBG	MAL AUSMA	Lebakwangi	2010	52
37	TBG	BANTARUJEG	Cikidang	2011	52
38	TBG	BANTARUJEG	Bantarujeg	2011	52
39	TBG	LEUWIMUNDING	Ciparay	2011	42
40	TBG	SUMBERJAYA	Loji Kobong	2011	72
41	TBG	LEUWIMUNDING	Patuanan	2011	52
42	TBG	SINDANG	Sangkanhurip	2011	52
43	TBG	LEMAHSUGIH	Margajaya	2011	62
44	TBG	MAL AUSMA	Sukadana	2011	72
45	TBG	CIGASONG	Simpeureum	2012	52
46	TBG	BANJARAN	Banjaran	2012	62
47	TBG	LEMAHSUGIH	Padarek	2012	52
48	TBG	LEMAHSUGIH	Kepuh	2012	52
49	TBG	MAL AUSMA	Werasari	2012	62
50	TBG	MAJALENGKA	Tonjong	2012	42
51	TBG	MAJALENGKA	Majalengka	2012	30
52	TBG	CIGASONG	Cigasong	2013	52



53	TBG	KERTAJATI	Mekarmulya	2013	42
54	TBG	LIGUNG	Sukawera	2013	32
55	TBG	LEUWIMUNDING	Leuwikujang	2013	52
56	TBG	DAWUAN	Jombol/Dawuan	2013	32
57	TBG	PANYINGKIRAN	Bonang	2014	52
58	TBG	PALASAH	Waringin	2018	52
59	TBG	JATIWANGI	Jatisura	2018	42
60	TBG	CIKIJING	Kasturi	2018	52
61	TBG	SUMBERJAYA	Bongas Kulon/tolgate	2019	62
62	TBG	BANJARAN	Darmalarang/Ganeas	2019	62
63	TBG	CINGAMBUL	Rawa/Wanakerta	2019	42
64	TBG	BANTARUJEG	Cimanggu Hilir	2019	42
65	TBG	BANTARUJEG	Sukamenak	2019	42
66	TBG	MAL AUSMA	Jagamulya	2019	52
67	TBG	DAWUAN	Mandapa/Wika Balida	2019	42
68	TBG	PANYINGKIRAN	Jatipamor	2019	32
69	TBG	MAJALENGKA	Cikasarung	2019	52
70	TBG	DAWUAN	Dawuan	2019	72
71	TBG	BANJARAN	Cimeong	2019	42
72	TBG	SINDANGWANGI	Leuwilaja	2019	42
73	TBG	LEUWIMUNDING	Parungjaya	2019	52
74	TBG	SUMBERJAYA	Banjaran	2019	32
75	TBG	MAJA	Cihaur	2019	52
76	TBG	Majalengka	Majalengka Kulon/Gempuran	2019	30
77	TBG	JATITUJUH	Panyingkiran/Majalengka	2020	42
78	TBG	DAWUAN/KADIPATEN	Bojong Cideres/Majalengka	2020	42
79	TBG	KADIPATEN	Karangsambung	2020	42
80	TBG	LIGUNG	Majasari	2020	42
81	TBG	SUMBERJAYA	Panjalin Lor	2020	62
82	TBG	KASOKANDEL	Gunungsari	2020	52
83	TBG	LEUWIMUNDING	Leuwimunding	2020	42
84	TBG	JATIWANGI	Cibentar	2020	52
85	TBG	KASOKANDEL	Wanajaya	2020	52
86	TBG	Majalengka	Majalengka Wetan/Margatapa	2020	36
87	TBG	KASOKANDEL	Kasokandel	2021	42
88	TBG	SINDANG	Bayureja	2022	62
89	TBG	BANTARUJEG	Sindanghurip	2022	62
90	TBG	MAL AUSMA	Mal ausma	2022	52
91	TBG	CIKIJING	Cipulus	2022	62
92	TBG	LIGUNG	Ligung Lor	2022	42
93	TBG	DAWUAN	Salawana/Cipali KM164	2022	42
94	TBG	TALAGA	Mekarraharja	2022	62
95	TBG	CINGAMBUL	Maniis	2022	62
96	TBG	CIKIJING	Cisoka	2023	62
97	TBG	PALASAH	Sindanghaji	2023	52
98	TBG	ARGAPURA	Tejamulya/Panyaweuyan	2023	72
99	TBG	PALASAH	Waringin Reloc	2024	72
100	TBG	SUKAHAJI	Jayi	2024	52
101	TBG	MAJALENGKA	Munjul/Paralayang	2024	42
102	TBG	MAJA	Cengal/Nunuk Baru	2024	42
103	TBG	LEMAHSUGIH	Borogojol	2024	62
104	TBG	ARGAPURA	Sukadana/Blok Jinkang	2025	72
105	TBG	BANTARUJEG	Silihwangi	2025	62
106	TBG	LEUWIMUNDING	Lame	2025	72



**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA  
PT. PROTELINDO**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	PROTELINDO (Ex. XL)	MAJALENGKA	Majalengka Wetan	2002	70
2	PROTELINDO (Ex. XL)	JATIWANGI	Sutawangi	2003	70
3	PROTELINDO	CIKIJING	Cidulang	2004	70
4	PROTELINDO (Ex. XL)	CIKIJING	Sukamukti	2004	70
5	PROTELINDO (Ex. XL)	LIGUNG	Ligung Lor	2005	70
6	PROTELINDO (Ex. XL)	MAJA	Wanahayu	2005	71
7	PROTELINDO (Ex. XL)	JATITUJUH	Jatitengah	2005	70
8	PROTELINDO	JATIWANGI	Burujul Wetan	2006	70
9	PROTELINDO	BANJARAN	Girimulya	2007	64
10	PROTELINDO	CIGASONG	Lingkung Sangraja	2007	64
11	PROTELINDO	CIKIJING	Banjaransari	2007	64
12	PROTELINDO	CINGAMBUL	Cingambul/Kulisi	2007	54
13	PROTELINDO	KADIPATEN/DAWU	Karangsambung/Brawijaya	2007	54
14	PROTELINDO	MAJA	Maja Selatan	2007	54
15	PROTELINDO	MAJALENGKA	Majalengka Kulon/Pramuka	2007	45
16	PROTELINDO	MAJALENGKA	Lingkungan Mekarguna/Tonjong	2007	35
17	PROTELINDO	PALASAH	Majasuka	2007	54
18	PROTELINDO	PANYINGKIRAN	Panyingkiran	2007	65
19	PROTELINDO	RAJAGALUH	Rajagaluh Lor/Cipinang	2007	54
20	PROTELINDO	SINDANGWANGI	Lengkong Wetan	2007	54
21	PROTELINDO	CIKIJING	Sukamukti	2008	64
22	PROTELINDO (Ex. XL)	SUKAHAJI	Tanjung Sari	2008	50
23	PROTELINDO (Ex. XL)	KADIPATEN	Kadipaten	2008	70
24	PROTELINDO (Ex. XL)	TALAGA	Talaga Wetan/Cipeucang	2008	70
25	PROTELINDO	JATITUJUH	Biyawak	2011	55
26	PROTELINDO	LIGUNG	Beber	2011	55
27	PROTELINDO	MAL AUSMA	Jagamulya	2011	70
28	PROTELINDO	RAJAGALUH	Payung	2011	70
29	PROTELINDO	SINDANG	Pasirayu	2011	70
30	PROTELINDO	JATITUJUH	Pilangsari	2011	75
31	PROTELINDO	KERTAJATI	Babakan	2011	70
32	PROTELINDO	TALAGA	Talaga Wetan	2012	30
33	PROTELINDO	JATIWANGI	Andir	2012	46
34	PROTELINDO	KADIPATEN	Liangjulung	2012	30
35	PROTELINDO	SUMBERJAYA	Rancaputat	2012	40
36	PROTELINDO	DAWUAN	Genteng	2012	40
37	PROTELINDO	JATIWANGI	Cicadas	2012	30
38	PROTELINDO	KADIPATEN	Pagandon	2012	40
39	PROTELINDO	CIKIJING	Sindangpanji	2012	46
40	PROTELINDO	BANJARAN	Sindangpala	2012	40
41	PROTELINDO	KADIPATEN	Karangsambung	2013	50
42	PROTELINDO	JATITUJUH	Putri Dalem	2013	55
43	PROTELINDO	PANYINGKIRAN	Pasirmuncang	2014	60
44	PROTELINDO	CIGASONG	Cicenang	2014	30
45	PROTELINDO	ARGAPURA	Sagara	2014	40
46	PROTELINDO	TALAGA	Lampuyang	2014	70
47	PROTELINDO	CIKIJING	Cidulang	2014	40
48	PROTELINDO	CIGASONG	Cigasong	2014	30
49	PROTELINDO	LIGUNG	Kodasari	2019	53
50	PROTELINDO	MAJALENGKA	Munjul	2019	52
51	PROTELINDO	PALASAH	Sindangwasa/Jahalaksana	2019	32
52	PROTELINDO	PALASAH	Trajaya/Tarikolot	2019	50
53	PROTELINDO	MAJA	Pasangrahan	2019	50



54	PROTELINDO	SINDANGWANGI	Lengkong Kulon	2019	50
55	PROTELINDO	LEUWIMUNDING	Parakan	2019	50
56	PROTELINDO	JATITUJUH	Putri Dalem	2019	50
57	PROTELINDO	KADIPATEN	Heuleut	2019	50
58	PROTELINDO	JATITUJUH	Jatiraga	2020	52
59	PROTELINDO	KASOKANDEL	Girimukti	2023	41
60	PROTELINDO	MAJALENGKA	Kel. Majalengka Wetan/Tonjong	2023	30
61	PROTELINDO	LEMAHSUGIH	Sinargalih	2024	71
62	PROTELINDO	BANTARUJEG	Salawangi	2024	71
63	PROTELINDO	PANYINGKIRAN	Karyamukti	2024	50
64	PROTELINDO	TALAGA	Lampuyang	2024	60
65	PROTELINDO	MAL AUSMA	Girimukti	2024	71
66	PROTELINDO	MAL AUSMA	Banyusari	2024	71
67	PROTELINDO	SUKAHAJI	Ciomas	2024	71
68	PROTELINDO	DAWUAN	Karanganyar	2024	51
69	PROTELINDO	BANTARUJEG	Cimangguhilir	2024	71
70	PROTELINDO	BANJARAN	Sangiang	2024	71

### DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA XL AXIATA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	XL	SINDANGWANGI/RAJAGALUH	Leuwilaja/Rajagaluh	2005	71
2	XL	CIGASONG	Baribis	2009	52

### DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA PT. EPID MENARA ASSETCO

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	EPID MENARA ASSETCO	JATI WANGI	Jl. Olahraga/Ciborelang	1997	60
2	EPID MENARA ASSETCO	ARGAPURA	Kebon Jati/Sagara	2004	100
3	EPID MENARA ASSETCO	SINDANGWANGI	Lontang Sari/Leuwilaja	2004	70
4	EPID MENARA ASSETCO	SUMBERJAYA	Bongas Wetan/Komp. Pertamina	2004	70
5	EPID MENARA ASSETCO	LIGUNG	Desa Buntu/Lanud Sukani	2007	43
6	EPID MENARA ASSETCO	KERTAJATI	Mekarjaya/Kp. Kertajaya	2008	52
7	EPID MENARA ASSETCO	LEMAHSUGIH	Margajaya/Kp. Pasirhanja	2008	52
8	EPID MENARA ASSETCO	LEMAHSUGIH	Borogojol	2008	52

### DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP)

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	STP	BANTARUJEG	Babakan Sari	2005	71
2	STP	KERTAJATI	Babakan	2005	36
3	STP	LEMAHSUGIH	Lemahputih	2005	71
4	STP	SUKAHAJI	Cikoneng	2005	71
5	STP	MAJA	Cihaur	2006	51
6	STP	PALASAH	Waringin	2006	51
7	STP	PANYINGKIRAN	Karyamukti	2007	51
8	STP	JATI WANGI	Ciborelang	2012	52
9	STP	LEMAHSUGIH	Margajaya	2014	72



**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA  
PT. SARANA INTI PERSADA (SIP)**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	SIP	MAJALENGKA	Sida Mukti	2007	52
2	SIP	CIKIJING	Cikijing	2007	71
3	SIP	JATITUJUH	jatitujuh	2007	61
5	SIP	PALASAH	Sindangwasa	2011	52
4	SIP	JATITUJUH	Pangkalanpari	2014	72
6	STP	TALAGA	Talaga Kulon	2020	42

**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA  
PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ( MITRATEL )**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	MITRATEL	RAJAGALUH	Rajagaluhlor	1996	36
2	MITRATEL	MAJALENGKA	majalengka wetan	1997	55
3	MITRATEL	CIGASONG	Cigasong	2002	72
4	MITRATEL	JATIWANGI/PALASAH	Loji/Sindangwasa	2002	36
5	MITRATEL	TALAGA	Ganeas	2002	42
6	MITRATEL	RAJAGALUH	Rajagaluh	2003	36
7	MITRATEL	MAJA	Anggrawati/Wanahayu	2003	72
8	MITRATEL	DAWUAN/JATIWANGI	Baturuyuk/Burujuul Kulon	2004	42
9	MITRATEL	JATITUJUH	Jatitujuh	2004	72
10	MITRATEL	JATIWANGI	Pinangraja	2004	72
11	MITRATEL	CIKIJING	Cimukti	2004	70
12	MITRATEL	TALAGA	Blok Cipeucang	2004	100
13	MITRATEL	PANYINGKIRAN	Panyingkiran	2004	62
14	MITRATEL	CINGAMBUL	Cikondang	2005	72
15	MITRATEL	KERTAJATI	Kertajati	2005	72
16	MITRATEL	LEMAHSUGIH	Lemahputih	2005	72
17	MITRATEL	LEUWIMUNDING	Ciparay/Leuwimunding	2005	72
18	MITRATEL	LIGUNG	Ligung Lor	2005	72
19	MITRATEL	PALASAH	Waringin	2005	62
20	MITRATEL	SUKAHAJI	Cikoneng/Cikalong	2005	72
21	MITRATEL	SUMBERJAYA	Garawangi	2005	72
22	MITRATEL	CINGAMBUL	Blok Jumat	2005	70
23	MITRATEL	BANTARUJEG	Babakan Sari	2005	72
24	MITRATEL	CIKIJING	Banjaransari/Kasturi	2005	72
25	MITRATEL	LIGUNG/JATIWANGI	Beusi/Jatisura	2006	42



26	MITRATEL	KERTAJATI	Kertawinagun	2006	42
27	MITRATEL	LEMAHSUGIH	Borogojol	2006	72
28	MITRATEL	MAJA	Maja Utara	2006	72
29	MITRATEL	MAJALENGKA	Kawunggirang	2006	62
30	MITRATEL	MAJALENGKA	Majalengka Kulon	2006	42
31	MITRATEL	MAJA	Cihaur	2006	72
32	MITRATEL	MAL AUSMA	Mal ausma	2006	72
33	MITRATEL	CIKIJING	Sindang/Sukasari	2007	36
34	MITRATEL	CINGAMBUL	Cintaasih	2007	62
35	MITRATEL	DAWUAN	Balida	2007	42
36	MITRATEL	KADIPATEN	Heuleut/Liangjulung	2007	42
37	MITRATEL	KASOKANDEL	Leuwikidang	2007	36
38	MITRATEL	DAWUAN/KASOKANDEL	Sinarjati/Kasokandel	2007	36
39	MITRATEL	LEMAHSUGIH	Kalapadua	2007	62
40	MITRATEL	LEUWIMUNDING	Parakan	2007	36
41	MITRATEL	MAJALENGKA	Majalengka Wetan/Sindangkasih	2007	42
42	MITRATEL	PALASAH	Eggalwangi	2007	42
43	MITRATEL	SINDANGWANGI	Ujung berung/Jerukleueut	2007	42
44	MITRATEL	SUMBERJAYA	Sepat/Prapatan/Paningkiran	2007	42
45	MITRATEL	SUMBERJAYA	Cidenok	2007	42
46	MITRATEL	TALAGA	Talaga Kulon	2007	36
47	MITRATEL	ARGAPURA	Argalingga	2007	52
48	MITRATEL	KASOKANDEL	Jatimulya	2007	72
49	MITRATEL	LIGUNG	Buntu	2007	42
50	MITRATEL	MAJALENGKA	Sidamukti	2007	62
51	MITRATEL	TALAGA	Mekaraharja	2007	36
52	MITRATEL	Mal ausma	Cimuncang	2008	52
53	MITRATEL	Mal ausma	Girimukti/Buninagara	2008	62
54	MITRATEL	JATI WANGI	Burujul Wetan/Andir	2008	42
55	MITRATEL	KADIPATEN	Babakan Anyar/Karangsambung	2008	42
56	MITRATEL	KASOKANDEL	Ranji Kulon	2008	42
57	MITRATEL	LEUWIMUNDING/SINDANGWANGI	Rajawangi/Balagedog	2008	42
58	MITRATEL	LIGUNG	Ampel	2008	36
59	MITRATEL	TALAGA	Margamukti	2008	62
60	MITRATEL	SUKAHAJI	Babakan Manjeti	2008	36
61	MITRATEL	SUKAHAJI	Jayi/Cikeusik	2008	42
62	MITRATEL	BANJARAN	Sunia	2008	42
63	MITRATEL	RAJAGALUH	Payung	2008	62
64	MITRATEL	SINDANG	Pasirayu	2008	62
65	MITRATEL	SINDANG	Indrakila	2008	72
66	MITRATEL	ARGAPURA	Mekarwangi	2009	52
67	MITRATEL	RAJAGALUH	Kumbang	2011	36
68	MITRATEL	PALASAH	Waringin	2011	42
69	MITRATEL	SUMBERJAYA	Bongas	2011	42
70	MITRATEL	RAJAGALUH	Rajagaluh Kidul	2011	52
71	MITRATEL	LIGUNG	Cibogor	2012	42
72	MITRATEL	CIKIJING	Cipasung/Cilangcang	2012	30
73	MITRATEL	JATI WANGI	Mekarsari	2012	36
74	MITRATEL	MAJALENGKA	Majalengka Wetan	2012	42
75	MITRATEL	DAWUAN	Dawuan	2012	36
76	MITRATEL	SINDANG	Sindang	2014	62
77	MITRATEL	ARGAPURA	Argalingga	2014	62



78	MITRATEL	MAJALENGKA	Cibodas	2014	72
79	MITRATEL	LEMAHSUGIH	mekarwangi	2014	42
80	MITRATEL	LEUWIMUNDING	karang Asem	2014	42
81	MITRATEL	KADIPATEN	Liangjulang	2014	42
82	MITRATEL	DAWUAN	Genteng	2016	36
83	MITRATEL	MAJALENGKA	Majalengka Kulon	2016	22
84	MITRATEL	MAJALENGKA	Majalengka Kulon	2016	42
85	MITRATEL	LEMAHSUGIH	Desa Sukamaju	2017	52
86	MITRATEL	CIKIJING	Banjarsari	2017	42
87	MITRATEL	LEMAHSUGIH	Cigaleuh	2017	42
88	MITRATEL	KASOKANDEL	Gunungsari	2017	42
89	MITRATEL	JATIWANGI	Loji	2017	52
90	MITRATEL	TALAGA	Jatipamor	2017	52
91	MITRATEL	KERTAJATI	Kertasari	2018	35
92	MITRATEL	MAJALENGKA	Sindangkasih	2019	36
93	MITRATEL	CIGASONG	Cicenang	2019	32
94	MITRATEL	LEMAHSUGIH	Padarek	2019	32
95	MITRATEL	KERTAJATI	Sahbandar	2019	42
96	MITRATEL	JATIWANGI	Surawangi	2019	52
97	MITRATEL	DAWUAN	Pasirmalati	2020	42
98	MITRATEL	KERTAJATI	Palasah	2020	42
99	MITRATEL	SUMBERJAYA	Parapatan	2020	42
100	MITRATEL	JATITUJUH	Panongan	2020	42
101	MITRATEL	JATITUJUH	Sumber Wetan	2020	42
102	MITRATEL	CIGASONG	Karayunan	2020	52
103	MITRATEL	CIGASONG	Batujaya	2020	52
104	MITRATEL	KASOKANDEL	Ranji Wetan	2020	52
105	MITRATEL	DAWUAN	Gandu	2020	32
106	MITRATEL	CIKIJING	Sukamukti	2020	70
107	MITRATEL	LIGUNG	Ampel	2020	42
108	MITRATEL	LIGUNG	Bantarwaru	2020	42
109	MITRATEL	SUKAHAJI	Nanggawer	2020	52
110	MITRATEL	BANJARAN	Sangiang	2021	62
111	MITRATEL	SINDANGWANGI	Padaherang	2021	62
112	MITRATEL	JATITUJUH	Randegan Wetan	2022	45
113	MITRATEL	CINGAMBUL	Sedareja	2024	62
114	INDOSAT OORED	KADIPATEN	Kadipaten	2019	42
115	INDOSAT OORED	MAJALENGKA	Majalengka Wetan	2019	32
116	MITRATEL	JATIWANGI	Leuweunggede	2024	42
117	MITRATEL	JATIWANGI	Burujul Wetan	2025	52

**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA  
PT. INTI BANGUN SEJAHTERA (IBS)**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	Inti Bangun Sejahtera	Cikijing	Sindang	2007	72
2	Inti Bangun Sejahtera	Maja	Cihaur	2007	92
3	Inti Bangun Sejahtera	Leuwimunding	Mirat	2007	72
4	Inti Bangun Sejahtera	Jatiwangi	Jatiwangi	2007	82
5	Inti Bangun Sejahtera	Maja	Sindangkerta	2007	72
6	Inti Bangun Sejahtera	Majalengka	Majalengka Kulon	2007	72
7	Inti Bangun Sejahtera	Rajagaluh	Sindangpano	2019	72
8	Inti Bangun Sejahtera	Sindangwangi	Lengkong Wetan	2019	52
9	Inti Bangun Sejahtera	Sumberjaya	Gelok Mulya	2021	42
10	Inti Bangun Sejahtera	Sumberjaya	sepat	2021	42
11	Inti Bangun Sejahtera	Sumberjaya	Panjalin Kidul	2023	42



### DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA PT. PERMATA KARYA PERDANA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	PERMATA KARYA PERDANA	PALASAH	Weragati	2023	42

### DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA PT. INDOSIAR

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	INDOSIAR	SUKAHAJI	Padahanten	2013	52

### DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	CENTRATAMA	KASOKANDEL	Gunungsari/Sinarjati	2006	51
2	CENTRATAMA	JATIWANGI	Sukaraja Wetan	2008	71
3	CENTRATAMA	CIGASONG	Tajur	2009	62
4	CENTRATAMA	SUKAHAJI	Palabuhan	2009	52
5	CENTRATAMA	LEUWIMUNDING	Tanjungsari/Heuleut	2014	32
6	CENTRATAMA	SUMBERJAYA	Bongas Kulon	2018	52
7	CENTRATAMA	JATIWANGI	Jatisura	2019	42
8	CENTRATAMA	LIGUNG	Tegalaren	2019	52
9	CENTRATAMA	JATIWANGI	Ciborelang	2019	32

### DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA PT. ERA BANGUN TOWERINDO

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	ERA BANGUN TOWERINDO	RAJAGALUH	Cisetu	2023	42

### DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA PT. LASMANA SWASTI PRASHIDA

NO	SITE NAME	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	TALAGA	LASMANA SWASTI PRASHIDA	BANJARAN	Genteng	2019	52
2	PALARONA_KERTAJATI	LASMANA SWASTI PRASHIDA	KERTAJATI	Palasah	2021	51
3	PALASAH_KERTAJATI	LASMANA SWASTI PRASHIDA	MAJALENGKA	Kulur	2021	52
4	JATISAWIT_KASOKANDEL	LASMANA SWASTI PRASHIDA	KASOKANDEL	Leuwikidang	2021	42
5	KAWUNGGIRANG_MAJA	LASMANA SWASTI PRASHIDA	MAJALENGKA	Kawunggirang	2021	60



**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA  
PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	KERTAJATI	Sahbandar	2022	51
2	GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	ARGAPURA	Gunungwangi	2022	51
3	GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	TALAGA	Argasari	2022	51
4	GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	LEMAHSUGIH	Padarek	2022	51
5	GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	KASOKANDEL	Jatimulya	2022	51

**DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA  
PT. PERSADA SOKKA TAMA**

NO	PROVIDER	KECAMATAN	DESA	TAHUN	TINGGI
1	PERSADA SOKKA TAMA	JATITUJUH	Jatitujuh	2021	42

Sumber data Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalengka 2025

**2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah dimaksud, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Pencapaian kinerja dan realiasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	NSPK	IKK	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	%	57,84	66,31	75	61	85	60	65	72	85	78,92	103,73	98,02	96	139,34	92,85
2	Persentase Indeks Kematangan SPBE	-	-	%	2,72	2,85	-	2,89	2,89	2,62	2,81	-	2,89	2,94	96,32	98,60	0	100,00	101,73
3	Persentase Indeks Pembangunan Statistik	-	-	%	-	-	-	2,6	2,8	-	-	-	2,6	2,75	-	-	0	100,00	98,21
4	Persentase Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	%	300	350	415	416	450	260	441	416	475	501	86,67	126,00	100,24096	114,18	111,33



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka memiliki empat Sasaran Strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien dengan indikator kinerja Indeks Kematangan SPBE, Meningkatnya Keamanan Informasi dengan indikator kinerja Indeks KAMI serta Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik.

Indikator Kinerja pertama yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berada pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh badan publik, termasuk pemerintah daerah seperti Kabupaten Majalengka. IKIP mengukur tiga aspek utama, yaitu struktur, proses, dan capaian dalam pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Pendekatan yang digunakan dalam IKIP adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), yang menekankan kewajiban negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak atas informasi publik.

Capaian kinerja IKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebesar 92,85% menunjukkan tingkat keterbukaan informasi publik yang masuk dalam kategori *Cukup Informatif*. Ini berarti bahwa pemerintah daerah telah memenuhi sebagian besar kewajibannya dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan agar mencapai kategori yang lebih tinggi. Nilai ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Indikator Kinerja kedua yaitu Indeks Kematangan SPBE berada pada Program Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Indeks Kematangan SPBE diperoleh dari penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE di suatu instansi pemerintah. Indeks Kematangan SPBE adalah alat ukur penting untuk menilai kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi



pemerintah. Capaian kinerja dengan nilai 101,73% yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penerapan SPBE di daerah tersebut berada pada kategori Baik, menandakan kematangan yang tinggi dalam pengelolaan dan pelayanan berbasis elektronik yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Indikator Kinerja ketiga yaitu Indeks KAMI (Keamanan Informasi) berada pada Program Penyelenggaraan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Indeks KAMI adalah alat evaluasi penting yang mengukur kesiapan dan kematangan tata kelola keamanan informasi di instansi pemerintah. Nilai 111,33% yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 menunjukkan bahwa layanan keamanan informasi di daerah tersebut telah memenuhi kerangka dasar standar keamanan informasi, mencerminkan peningkatan kualitas layanan keamanan informasi yang signifikan dan kesiapan yang baik dalam menghadapi tantangan keamanan digital.

Indikator Kinerja keempat yaitu Indeks Pembangunan Statistik berada pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) diperoleh dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Pemkab Majalengka. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah alat ukur penting untuk menilai kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah. Nilai 98,21% yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pembangunan statistik di daerah ini berada dalam kategori Baik, mencerminkan kualitas penyelenggaraan statistik yang memadai dan mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data.



Tabel 2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka

Uraian	Anggaran (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN URUSAN KOMINFO	812.100.000					771.564.946					95,01						
PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	42.000.000					37.950.000					90,38						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	132.400.000					127.916.500					96,61						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1.546.740.000					1.513.766.439					97,87						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA		4.702.739.115	5.393.998.809	4.805.081.672	5.310.447.719		4.695.610.317	4.571.364.042	4.602.330.251	5.125.525.293		99,85	84,75	95,78	96,52	4,77	3,13
PROGRAM INFORMASIDAN KOMUNIKASIPUBLIK		888.591.169	517.950.000	696.820.000	2.006.777.500	0	887.032.369	283.228.108	693.746.165	2.006.022.969	#DIV/0!	99,82	51,98	100	99,96	60,27	92,40

Uraian	Anggaran (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		749.502.800	643.727.000	454.912.000	938.915.000	0	744.401.460	555.605.500	454.912.000	676.157.000	#DIV/0!	99,32	66,31	100	93,32	20,98	15,03
PROGRAM PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL		113.150.000	106.620.000	48.000.000	112.000.000	0	111.150.000	58.920.000	48.000.000	110.200.000	#DIV/0!	98,23	55,26	100	98,38	24,18	21,35
PROGRAM PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENJAMINAN INFORMASI		140.550.000	51.900.000	24.000.000	109.999.000	0,00	139.345.000	40.500.000	24.000.000	109.689.000	#DIV/0!	99,14	76,03	100	99,91	80,50	82,08
Jumlah	2.533.240.000	6.594.533.075	6.714.195.809	6.028.813.672	8.478.139.219	2.451.197.885	6.577.539.157	5.495.616.650	5.822.988.416	8.227.804.262	96,76	99,74	81,85	96,59	97,05	31,79	35,67

Berdasarkan data pada Tabel 2.1.3.2 dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 daya serap anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dapat dikatakan baik karena rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran berhasil dicapai dengan capaian 94%. Dan rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2020-2024 sebesar 31 % dengan tren yang cenderung meningkat.



#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tusi) berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 99 Tahun 2021, kelompok sasaran layanan utama meliputi:

a. **Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka**

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan layanan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Majalengka, termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur komunikasi, pengelolaan data dan statistik sektoral, serta pengamanan informasi dan persandian.

b. **Masyarakat Umum**

Masyarakat sebagai pengguna layanan informasi publik menjadi sasaran utama dalam pelayanan permohonan informasi melalui PPID, pelayanan pengaduan, dan pemberdayaan masyarakat agar melek informasi serta mendapatkan akses informasi yang transparan dan akuntabel.

c. **Pelaku Media dan Komunikasi Publik**

Termasuk media massa, media sosial, dan mitra komunikasi publik lainnya yang menjadi mitra dalam diseminasi informasi dan komunikasi publik yang akurat dan terpercaya.

d. **Instansi Pemerintah Lain dan Stakeholder Terkait**

Meliputi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan statistik sektoral, pengembangan aplikasi informatika, serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Adapun layanan dan fungsi yang menjadi sasaran yaitu :

a. **Pelayanan Informasi Publik**

Melayani permohonan informasi sesuai peraturan keterbukaan informasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media.



**b. Pengelolaan Statistik Sektoral**

Menyediakan data dan informasi statistik yang mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

**c. Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi**

Menjamin keamanan informasi dan komunikasi data pemerintah daerah melalui pengelolaan persandian dan pengamanan data.

**d. Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika**

Mendukung transformasi digital pemerintah daerah melalui pengembangan e-Government dan aplikasi informatika yang memudahkan pelayanan publik.

**e. Pembinaan dan Koordinasi Internal**

Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik sektoral di lingkungan Pemkab Majalengka.

### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam pemberian pelayanan terdiri dari berbagai pihak yang berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, berikut beberapa mitra Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam pemberian pelayanan:

**a. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

KIM merupakan mitra strategis utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam penyebaran informasi dan pemberdayaan masyarakat. KIM berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, membantu menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat serta menangkal hoaks dan misinformasi. Saat ini terdapat sekitar 17 kelompok KIM yang tersebar di berbagai desa dan wilayah di Majalengka, yang juga berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat dan mempercepat penyampaian informasi publik hingga pelosok desa.

**b. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mitra Statistik**

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan BPS Kabupaten Majalengka dan mitra statistik lainnya untuk pengumpulan dan pengelolaan data yang berkualitas, mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.



### c. Media Massa dan Mitra Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kemitraan dengan media massa dan pelaku komunikasi publik lainnya untuk memastikan penyebaran informasi yang luas, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat. Kemitraan ini juga mendukung kegiatan pembinaan komunitas dan pengembangan konten positif yang mendukung program pemerintah daerah.

### d. Penyedia jasa internet (ISP lokal)

Dinas Kominfo juga menjalin kemitraan dengan ISP lokal seperti GISAKA untuk memberikan dukungan teknis yang responsif, menjaga kedaulatan data di wilayah Majalengka, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital lokal. Kemitraan ini memastikan bahwa jaringan yang dibangun tidak hanya aman dan efisien tetapi juga mampu mendukung pengembangan teknologi digital di daerah. Dengan strategi ini, Majalengka akan berkembang menjadi kabupaten yang lebih digital, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.

### e. Kemitraan dengan RTIK

Kemitraan Diskominfo Kabupaten Majalengka dengan Relawan TIK (RTIK) merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, khususnya di era digital, Misalnya, RTIK Majalengka turut membantu program *Desa Digital* dengan melatih operator desa dalam mengelola website resmi dan aplikasi pelayanan administrasi seperti surat menyurat online. Hal ini mempermudah warga dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke balai desa.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat daerah merupakan berbagai bentuk kendala, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan fungsional maupun teknis kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta berdasarkan Perda nomor Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 061 / Kep.783-Org/2020 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka ada 2 tugas



pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi, adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib Pemerintah Tidak Terkait Pelayanan Dasar 1 ( Satu ) dibidang Komunikasi 2 ( Dua ) Informatika dan 3 (Tiga) urusan di bidang Statistik Sektoral 4 ( Empat ) urusan bidang Persandian. Adapun beberapa hal yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, berikut beberapa permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Majalengka yang dihadapi :

#### 1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Minimnya Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan SDM di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika yang memadai
- Kurangnya Sarana Infrastuktur Komunikasi Informatika yang mendukung terhadap Peningkatan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan berbasis Elektronik.
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan transformasi digital pemerintah.
- Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Majalengka yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya Pembangunan.
- Belum tersedianya command center.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya pemeliharaan jaringan internet, implementasi Majalengka Smart City dan pengelolaan Panggilan Darurat 112.
- Belum memiliki Infrastruktur jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD), sehingga Diskominfo belum menjalankan fungsinya sebagai penyedia akses jaringan internet ke semua OPD dengan titik sektoral dalam penyediaan akses internet yang difasilitasi Diskominfo.
- Belum meratanya kualitas layanan Komunikasi sampai ke Pedesaan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami akan pentingnya Informasi Publik yang disediakan Pemerintahan.

#### 2. Urusan Statistik Sektoral

- Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sesuai kualifikasi Pendidikan yang diperlukan.



- Ketersediaan data rendah, kurangnya ketersediaan data-data yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan data/informasi secara cepat, tepat dan akurat.
- Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral
- Terbatasnya anggaran penyelenggaraan statistik sektoral.

### 3. Urusan Persandian

- Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang persandian.
- Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan persandian
- Belum optimalnya pengamanan informasi

## 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka memiliki peran sentral dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan persandian. Isu strategis yang dihadapi sangat dinamis, seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi dan transparan, berikut tabel isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka :

Tabel 2.2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1). Potensi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Belum Optimalnya Sarana Infrastruktur Komunikasi Informatika yang mendukung terhadap Peningkatan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan berbasis Elektronik	Pemanfaatan TIK untuk Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan			Integrasi SPBE Perangkat Daerah	Meningkatkan Integrasi SPBE Perangkat Daerah
2). Potensi Layanan Publik Berbasis Digital (e-Government)	Belum Optimalnya integrasi layanan e-Government dalam menunjang jaringan Intra Pemerintah Daerah		Dorongan untuk Menerapkan Prinsip Pemerintahan yang Berkelanjutan (Green Governance)	Penerapan transformasi layanan Publik berbasis Digital (PEMDI)		Meningkatkan Desiminasi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik melalui Peningkatan Pelayanan Informasi, Pengelolaan Informasi dan Peningkatan keterbukaan informasi publik
3). Potensi Informasi Publik dan Kehumasan	Belum optimalnya layanan informasi Publik kepada masyarakat sehingga masih perlu ditingkatkan	Keterbukaan Informasi Lingkungan				



<p>4). Potensi Peningkatan Kualitas dan Literasi Data OPD</p>	<p>Belum optimalnya ketepatan data Statistik setiap OPD secara konsisten terhadap validitas data yang benar-benar di pertanggungjawabkan.</p> <p>Belum optimalnya pemahaman Masyarakat terhadap manfaat data Statistik</p>	<p>Penguatan Data dan Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan Berbasis Lingkungan</p>	<p>Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, transformasi digital, dampak perubahan iklim, serta pentingnya kolaborasi internasional dalam penyelenggaraan statistik sektoral.</p>	<p>Peningkatan kualitas dan standarisasi data, kolaborasi lintas instansi, evaluasi berbasis IPS, tantangan transformasi digital, serta peran strategis statistik sektoral dalam kebijakan nasional.</p>	<p>Pembinaan yang belum merata, keterbatasan anggaran, partisipasi evaluasi yang belum optimal, serta kebutuhan kolaborasi untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas.</p>	<p>Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik sektoral melalui identifikasi kebutuhan data, pengumpulan dan Analisis data, penyajian data</p>
<p>5). Potensi Keamanan Informasi dan Data</p>	<p>Belum Optimalnya OPD yang menggunakan Persandian untuk Pengamanan Data dan Informasi</p> <p>Belum terlaksananya ITSA (Information Technology Security Assessment)</p>	<p>Perlindungan Data dan Keamanan Siber</p>	<p>Meningkatnya ancaman siber yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, pentingnya kolaborasi lintas sektor, serta kebutuhan regulasi dan standar keamanan yang kuat untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan layanan publik digital.</p>	<p>Ketimpangan infrastruktur, ancaman siber yang meningkat, keterbatasan SDM, kurangnya kesadaran dan regulasi yang konsisten, serta upaya kolaborasi dengan BSSN untuk memperkuat pengamanan informasi pemerintah daerah</p>	<p>Prioritas pengelolaan keamanan informasi, peningkatan indeks, kolaborasi dengan BSSN, dan tantangan infrastruktur serta ancaman siber yang terus berkembang</p>	<p>Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintahan yang terkoneksi</p>



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan, yaitu hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dan dapat diukur. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

#### **3.2. Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran merupakan perumusan kondisi yang merepresentasikan tercapainya tujuan, yang diwujudkan dalam bentuk hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah. Sasaran ini diperoleh melalui capaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Dengan demikian, sasaran mencerminkan ukuran kinerja yang hendak dicapai secara terukur, realistis, dan relevan terhadap tujuan strategis, serta menjadi landasan dalam perencanaan program dan kegiatan yang bersifat operasional. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien/  
Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah
- 2) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 4) Meningkatnya Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	A-	A-	A	A	A	A	
		Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	3,50*	1,50	1,50	1,80	1,80	2,00	- Target Tahun 2025 adalah Indeks SPBE  - Mulai tahun 2026 adalah Indeks Pemdi (Pemerintah digital) dengan penilaian setiap 2 tahun sekali
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	
		Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,75	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	
		Meningkatnya Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	505	510	515	520	525	530	



### 3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang diterapkan dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Majalengka disesuaikan dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada dan disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Adapun rumusan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut :

*Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka*

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar Tata Kelola SPBE dan Keamanan Informasi  (Tersusunnya regulasi dan standar teknis SPBE & keamanan informasi daerah)	Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur  (SDM kompeten & infrastruktur keamanan dasar terbangun)	Optimalisasi Implementasi SPBE Terintegrasi  (Integrasi layanan dan data antar perangkat daerah)	Pemantapan Kinerja dan Layanan Publik Digital  (Layanan publik digital aman, terintegrasi, dan efektif)	Kemandirian & Keberlanjutan Transformasi Digital Daerah  (Terwujudnya tata kelola SPBE berkelanjutan & berstandar Nasional )

### 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan landasan konseptual yang menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan sepanjang periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kejelasan orientasi dan fokus pembangunan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, dengan tetap memperhatikan kesinambungan antara visi dan misi Kepala Daerah, tujuan pembangunan daerah, serta dinamika isu-isu strategis yang berkembang dalam konteks lokal dan nasional





No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknik dan pelatihan sumberdaya manusia.	2. Peningkatan Kapasitas & Kesadaran Keamanan  3. Pemanjapan Tata Kelola & Infrastruktur  Penguatan Kompetensi ASN di Bidang Teknologi & Layanan Publik	mengatur keamanan informasi.  -Menerapkan kebijakan pengelolaan data yang memisahkan tingkat klasifikasi (rahasia, terbatas, publik)  - Pelatihan dan sertifikasi keamanan siber bagi pegawai pengelola sistem informasi di perangkat daerah  - Membangun Tim Keamanan Informasi Daerah yang terintegrasi dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nasional. - Memastikan infrastruktur keamanan (firewall, IDS/IPS, enkripsi data, backup terjadwal) tersedia dan terpelihara.  Menyelenggarakan bimtek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bagi



No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatkan audit dan supervisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Memperkuat Tata Kelola Audit SPBE  2. Meningkatkan Kapasitas Tim Auditor dan Pengelola SPBE	operator dan admin perangkat daerah. - Pelatihan manajemen data dan keamanan informasi untuk mendukung pelayanan publik yang aman.  - Menetapkan pedoman dan prosedur audit internal SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional  Menyelenggarakan pelatihan teknis audit SPBE, keamanan informasi, dan evaluasi aplikasi.
		Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana keamanan informasi	Penguatan Infrastruktur Keamanan Informasi	- Menyediakan perangkat keras keamanan jaringan (firewall, IDS/IPS, router aman). - Menyediakan sistem <i>backup</i> dan <i>disaster recovery</i> untuk menjaga kontinuitas layanan. - Memperkuat pusat data (data center) dan jaringan



No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				komunikasi agar tahan terhadap gangguan.



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Sub Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka periode 2025 - 2029.

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka, serta mengacu pada nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Program untuk tahun 2025 – 2029 ada 5 (lima) Program, kegiatan terdiri 12 (dua belas) kegiatan, dan 52 Sub Kegiatan. Anggaran tersebut rencananya akan didanai dari APBD Kabupaten Majalengka, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi



Berikut ini rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka untuk Renstra Periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

- 1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
  - 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
  - 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
- 2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /



- 1. Penerangan Bangunan Kantor
- 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan
- 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan :
    - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Kegiatan : **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**  
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

## II Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- 8 Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan :
- 1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - 2 Pelayanan Informasi Publik
  - 3 Relasi Media
  - 4 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
  - 5 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  - 6 Diseminasi Informasi

## III Program Aplikasi Informatika

- 9 Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub



Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah  
Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan nama Domain Pemerintah Desa

10 Kegiatan : Pengelolaan e- Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan

- 1 Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
- 2 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- 3 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE.
- 4 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
- 5 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 6 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
- 7 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
- 8 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- 9 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas



10 Penyediaan Akses Internet

11 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan  
Pemerintah Daerah yang terintegrasi

#### **IV Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

11 Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di  
Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

1 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap  
Sistem Statistik Nasional

2 Peningkatan Kualitas Data Statistik

3 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral  
Sesuai Standar

4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik  
Sektoral

5 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang  
sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

#### **V Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

12 Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk  
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah  
Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan 1 Penyediaan layanan Keamanan Informasi dan  
Persandian Pemerintah Daerah

2 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah  
Daerah berbasis Elektronik dan Non  
Elektronik

3 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan  
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan  
Informasi Pemerintah Daerah



Kabupaten/Kota

- 4 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya tata kelola yang sistematis, berkualitas, dan akuntabel dalam pelayanan dan pengelolaan data serta informasi publik	Tersedianya sistem dan mekanisme pelayanan serta pengelolaan data dan informasi publik yang terstandar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan	Nilai RB General Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
			Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah		Persentase Belanja PDN Dinas Komunikasi dan Informatika		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	Nilai SAKIP PD	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	



						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah y	Presentase Realisasi APBD	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Ditindak lanjutinya Laporan Hasil Pemeriksaan	Persentase TLHP dan APIP PD		
				ASN menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
			<b>Barang Milik Daerah Tertib Administrasi</b>	<b>Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
				Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			<b>Barang Milik Daerah Memadai</b>	<b>Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi</b>	<b>Presentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin	



						Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Barang Milik Daerah Berfungsi</b>	<b>Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			<b>Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN PD</b>	<b>Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Tersusunnya arsip secara sistematis dan terklasifikasi	Nilai Audit Kearsipan Internal PD	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Meningkatnya Kualitas	Peningkatan Kualitas	Nilai Survey Kepuasan		



			Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Pelayanan publik perangkat daerah	Masyarakat (SKM) PD		
			Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Berspesifikasi PDN	Peningkatan Pengawasan Pengadaan Barang Jasa Bersertifikasi PDN	Jumlah pengadaan barang dan jasa berspesifikasi PDN yang terpantau Target 100%	Penyediaan pengadaan barang dan jasa berspesifikasi PDN	
			Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi	Terpenuhinya kebutuhan Prasarana dan Sarana	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi		
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan	



						Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kuallitas Informasi dan Produk Kehumasan Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi	Tersedianya produk dan konten kehumasan yang informatif, menarik, dan mudah diakses melalui berbagai media informasi	Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Pelayanan Informasi  Meningkatnya Pelayanan Pengaduan	Tersedianya sistem, layanan, dan publikasi informasi publik yang transparan dan mudah diakses Masyarakat.  Terselesaikannya pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase IKM pelayanan Informasi Publik.  Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	
			Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik	Tersedianya media, konten, dan mekanisme penyebarluasan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses masyarakat	Persentase informasi Publik yang terpublikasi	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	



	Meningkatnya Kemitraan Penyebarluasan Informasi	Tersedianya mekanisme, platform, dan aktivitas kolaboratif dengan mitra strategis untuk penyebarluasan informasi publik yang efektif dan terjangkau	Presentase Informasi yang disebarkan oleh mitra sesuai standar	Sub Kegiatan Relasi Media	
				Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan melalui quick response sistem	Tersedianya sistem, prosedur, dan SDM yang mendukung layanan pengaduan cepat, responsif, dan terintegrasi bagi Masyarakat.	Presentase Pelaporan Kedaruratan yang Terinformasikan kepada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Tersedianya sistem, prosedur, dan SDM yang mendukung layanan pengaduan melalui SP4N Lapor yang cepat, responsif,	Presentase Pengaduan yang Terinformasikan kepada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN			TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Transformasi digital pemerintah	Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Elektronik	Tersedianya infrastruktur, sistem, dan layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintah Digital	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	
					<b>Meningkatnya Kualitas Kebijakan SPBE</b>	Tersedianya kebijakan, pedoman, dan dokumen tata kelola SPBE yang terstandar dan mendukung implementasi pemerintahan digital yang efektif	Presentase Kebijakan SPBE yang Berkualitas	<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SubDomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Meningkatnya Kualitas	Tersedianya	Presentase Tata Kelola	Sub Kegiatan	



			Tata Kelola SPBE	dokumen, sistem, dan mekanisme tata kelola SPBE yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan	SPBE yang Berkualitas	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan nama Domain Pemerintah Desa	
			Meningkatnya Kualitas Implementasi Manajemen SPBE	Tersedianya sistem, pedoman, dan mekanisme manajemen SPBE yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kinerja layanan pemerintahan digital	Presentase Implementasi Manajemen SPBE yang Berkualitas	<b>Kegiatan Pengelolaan E-government diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
						Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra	



						Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
						Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
						Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
						Penyediaan Akses Internet	
						Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	



			Meningkatnya Kualitas Implementasi Manajemen SPBE	Tersedianya sistem, pedoman, dan mekanisme manajemen SPBE yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kinerja layanan pemerintahan digital	Presentase Implementasi Manajemen SPBE yang Berkualitas		
						Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas layanan stastistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan	Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Tersedianya layanan statistik sektoral yang akurat, terstandar, mutakhir, dan mudah diakses untuk	<b>Persentase Pemanfaatan Data Sektoral yang Dimanfaatkan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	



		Pemerintah Daerah		mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah			
			Data dan Informasi Sektoral Valid dan Mutakhir	Tersedianya data dan informasi sektoral yang valid, mutakhir, terdokumentasi, dan mudah diakses melalui sistem yang terintegrasi.	Presentase Data dan Informasi Sektoral yang Valid dan Mutakhir	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota</b>	
						Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			Meningkatnya Publikasi Data Sektoral	Tersedianya dan terpublikasinya data sektoral yang akurat, mutakhir, dan	Presentase Publikasi Data Sektoral		



				mudah diakses melalui portal data pemerintah			
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data	
<b>• NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
Meningkatnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Keamanan Informasi		Tersedianya kebijakan, sistem, infrastruktur, dan mekanisme pengelolaan keamanan siber serta sandi yang andal, aman, dan terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah	<b>Indeks Kemanan Informasi (KAMI)</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	



			Meningkatnya Perlindungan Data Pribadi	Tersedianya kebijakan, mekanisme, sistem, dan kapasitas SDM yang mendukung pengelolaan dan perlindungan data pribadi secara aman dan terstandar	Presentase Indeks KAMI Dimensi Perlindungan Data Pribadi	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Tersedianya kebijakan, prosedur, sistem, dan kapasitas SDM yang mendukung kerangka kerja keamanan informasi yang andal, terstandar, dan berkelanjutan	Presentase Indeks KAMI Dimensi Kerangka Kerja		



						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan Cyber	Tersedianya kebijakan, prosedur, sistem, dan SDM yang mendukung keamanan aset sistem elektronik agar tahan terhadap serangan siber.	Presentase Indeks KAMI Dimensi Aset Sistem Elektronik		
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	





Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

No	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E/ OUTPUT	Satuan	BAS E- LIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	<b>Outcome :</b>															
	1. Terintegrasi SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan efisien (Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah)	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	2,94 1,39	3,70 1,50	2.099.360.000	4,20 1,50	4.749.360.000	4,30 1,80	4.749.360.000	4,40 1,80	4.749.360.000	4,50 2,00	4.749.360.000	*Hasil konversi dari indeks SPBE ke Pemdi	
	2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Nilai	78,92	90,05	983.400.000	90,10	1.083.400.000	90,15	1.183.400.000	90,20	1.083.400.000	90,25	1.083.400.000		
	3. Meningkatnya Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	Nilai	501	510	100.000.000	515	360.000.000	520	390.000.000	525	410.000.000	530	450.000.000		



	4.	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,75	2,80	161.500.000	2,85	177.650.000	2,90	195.055.000	2,95	214.956.500	3,00	236.452.150	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.791.191.735		6.481.724.585		6.481.724.585		6.481.724.585		6.481.724.585	
	1.1	Outcome :														
		1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	56,21	60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>27.500.000</b>		<b>27.500.000</b>		<b>27.500.000</b>		<b>27.500.000</b>		<b>27.500.000</b>	
	1.1.1	Outcome :														
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	A (80,00)	A (80,25)		A (81,00)		A (81,15)		A (81,50)		A (82,00)		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SKPD)														
		Output :														



	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
	Output :														
	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
	Output :														
	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
	Output :														
	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
	Output :														
	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	Output :														
	Tersusunnya Dokumen Pengukuran dan Pelaporan Perangkat	Jumlah dokumen Pelaporan PD yang	Laporan	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	



	Daerah	disusun														
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Output :															
	Terevaluasinya kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>5.010.000.000</b>		<b>5.010.000.000</b>		<b>5.010.000.000</b>		<b>5.010.000.000</b>		<b>5.010.000.000</b>		
	1.1.2	Outcome :														
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realiasi APBD PD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Ditindaklanjutinya Laporan Hasil Pemeriksaan	Persentase TLHP BPK dan APIP PD													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	Output :															
		ASN menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	orang/bulan	37	37	5.000.000.000	37	5.000.000.000	37	5.000.000.000	37	5.000.000.000	37	5.000.000.000	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
	Output :															
	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
	Output :															
	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
	<b>Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah</b>					-		-		-		-		-		
1.1.3	Outcome :															
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD		89,91	90,00		92,00		93,00		94,00		95,00			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
	Output :															
	Data kepegawaian terinput ke sistem kepegawaian	Jumlah pegawai yang datanya terinput ke sistem informasi kepegawaia	Orang	31	37		37		37		37		37			



			n													
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					358.467.150		268.000.000		268.000.000		268.000.000		268.000.000	
	1.1.4	Outcome :														
		Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prsarana yang terpenuhi		75,00	80		85		90		95		100		
		Meningkatnya Kualias Informasi dan Produk Kehumasan	Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi		46,00	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD		94,00	94,00		94,50		95,00		95,00		95,00		
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Berspesifikasi PDN	Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi PDN		100	100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal PD		100	100		100		100		100		100		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Output :														



	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	12.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	Output :														
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	Paket	1	1	77.467.150	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
	Output :														
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	Output :														
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	85.000.000	3	32.000.000	3	32.000.000	3	32.000.000	3	32.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														



	Output :														
	Tersedianya Barang Habis Pakai	Jumlah Barang Habis Pakai yang disediakan	Paket	3	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan													
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	Output :														
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	Output :														
	Disepakatinya upaya bersama untuk mencapai suatu output pada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Rapat	Jumlah dokumen Kesepakatan Hasil Rapat	Laporan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>4.644.736.000</b>		<b>994.736.000</b>		<b>994.736.000</b>		<b>994.736.000</b>		<b>994.736.000</b>	
1.1.5	Outcome :														



	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi Terpenuhi	Persentasi Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver dan Komunikasi Terpenuhi	Persen	100	100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	Output :													
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik, kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik kebersihan dan keamanan kantor	Laporan	4	4	4.150.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	Output :													
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	4	4	494.736.000	4	494.736.000	4	494.736.000	4	494.736.000	4	494.736.000



	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					146.488.585		141.488.585		141.488.585		141.488.585		141.488.585
1.1.6	Outcome :													
	Barang Milik Daerah Berfungsi	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	80	80		85		90		95		100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Output :													
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara dan Terbayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara dan Terbayarkan Pajaknya	Unit	3	3	X'x	3	1.488.585	3	1.488.585	3	1.488.585	3	1.488.585
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Output :													
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	45.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													



	Output :														
	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>604.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>40.000.100</b>	
1.1.7	Outcome :														
	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	Persen	-	80		85		90		100		100	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	Output :														
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	584.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	Output :														
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	



			tersedia													
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					983.400.000		1.083.400.000		1.183.400.000		1.083.400.000		1.083.400.000		
	2.1	Outcome :														
		Meningkatnya Pelayanan Informasi	Prosentase IKM pelayanan Informasi Publik	Persen	90	90		90		90		90		90		
		Meningkatnya Pelayanan Pengaduan	Prosentase Pengaduan yang Ditindak lanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					983.400.000		1.083.400.000		1.183.400.000		1.083.400.000		1.083.400.000		
	Out come : Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara efektif		Persentase informasi komunikasi publik yang dikelola	Persen	90	90		90		90		90		90		
	Relasi Media															
	2.1.1	Output :														



		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	1	1	23.100.000	1	23.100.000	1	23.100.000	1	23.100.000	1	23.100.000	
	Pelayanan Informasi Publik															
	2.1.2	Output :														
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-an	Laporan	60	60	170.275.000	60	170.275.000	60	170.275.000	60	170.275.000	60	170.275.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik															
	2.1.3	Output :														



		Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4	4	240.150.000	4	240.150.000	4	240.150.000	4	240.150.000	4	240.150.000
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
	2.1.4	Output :													
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	23	23	49.950.000	23	49.950.000	23	49.950.000	23	49.950.000	23	49.950.000
		Diseminasi Informasi													
	2.1.5	Output :													
		Terlaksananya Diseminasi Informasi	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	90	90	299.925.000	90	399.925.000	90	499.925.000	90	399.925.000	90	399.925.000
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													
	2.1.6	Output :													



		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>						<b>2.099.360.000</b>		<b>4.749.360.000</b>		<b>4.749.360.000</b>		<b>4.749.360.000</b>		<b>4.749.360.000</b>
	3.1	Outcome :													
		Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Elektronik	Prosentase SPBE Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persen		60,00		65,00		70,00		75,00		80,00	
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						724.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Kebijakan SPBE	Persentase Kebijakan SPBE yang Berkualitas	Persen		50		50		50		50		50	



	Out Come :	Persentase Tata Kelola SPBE yang Berkualitas	Persen		50		50		50		50		50	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SPBE													
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa													
3.1.1	Output :													
	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan SubDomain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	1	724.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000
	<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.375.360.000</b>		<b>4.725.360.000</b>		<b>4.725.360.000</b>		<b>4.725.360.000</b>		<b>4.725.360.000</b>
	Outcome :	Persentase Implementasi Manajemen SPBE yang Berkualitas	Persen		50		50		50		50		50	
	Meningkatnya Kualitas Implementasi Manajemen SPBE													
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE													
3.2.1	Output :													



		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	2	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
	3.2.2	Output :														
		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	
		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan /atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE														
	3.2.3	Output :														
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau	Dokumen	1	1	83.360.000	1	83.360.000	1	83.360.000	1	83.360.000	1	83.360.000	



			au kolaborasi penyeleng araan SPBE													
		Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
	3.2.4	Output :														
		Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	106.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
	3.2.5	Output :														



		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-	31		57		70		247		413		
		Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
	3.2.6	Output :														
		Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	-	1		1		1		1		1		
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
	3.2.7	Output :														
		Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur	Aplikasi	-	1		1		1		1		1		



			dan peta rencana SPBE pemerintah daerah													
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
	3.2.8	Output :														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	1	500.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
	3.2.9	Output :														



		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-	57	-	57	3.800.000.000	57	3.800.000.000	57	3.800.000.000	57	3.800.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas															
	3.3.0	Output :														
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas	Unit	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi															
	3.3.1	Output : Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	2	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	



4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>					161.500.000		177.650.000		195.055.000		214.956.500		236.452.150	
4.1	Outcome :														
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Prosentase Pemanfaatan Data Sektoral yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100	100,0	100	100	100		
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					161.500.000		177.650.000		195.055.000		214.956.500		236.452.150	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik sektoral														
4.1.1	Output :														
		Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persen	100	100	31.000.000	100	34.100.000	100	37.150.000	100	41.261.000	100	45.387.100
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
4.1.2	Output :														
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina	Dokumen	1	1	31.500.000	1	34.650.000	1	38.115.000	1	41.926.500	1	46.119.150



			Data Statistik													
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
	4.1.3	Output :														
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	60	70	31.500.000	80	34.650.000	90	38.115.000	100	41.926.500	100	46.119.150	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
	4.1.4	Output :														
		Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata pelatihan di bidang statistik	Meta data	90	18	43.500.000	18	47.850.000	18	52.635.000	18	57.898.500	18	63.688.350	
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indonesia														
	4.1.5	Output :														



		Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Dokumen	1	1	24.000.000	1	26.400.000	1	29.040.000	1	31.944.000	1	35.138.400	
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>						<b>100.000.000</b>		<b>360.000.000</b>		<b>390.000.000</b>		<b>410.000.000</b>		<b>450.000.000</b>	
	5.1	Outcome :														
		Meningkatnya Perlindungan Data Pribadi	Persentase Indeks KAMI Dimensi Perlindungan Data Pribadi	Persen	52,00	57,00		62,00		67,00		72,00		77,00		
		Meningkatnya Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Persentase Indeks KAMI Dimensi Kerangka Kerja	Persen	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		
		Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan Cyber	Persentase Indeks KAMI Dimensi Aset Sistem Elektronik	Persen	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		



	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					100.000.000		360.000.000		390.000.000		410.000.000		450.000.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
	5.1.1	Output :													
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1,00	1,00	41.000.000	1,00	80.000.000	1,00	100.000.000	1,00	120.000.000	1,00	150.000.000
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah													
	5.1.2	Output :													
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	53	53	50.000.000	53	250.000.000	53	250.000.000	53	250.000.000	53	250.000.000



	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
	5.1.3	Output :													
		Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	6.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
	5.1.4	Output :													
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	3.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000



Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>  <b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Elektronik  Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan : - Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE  Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Kegiatan :	<b>Program Unggulan :</b> Membangun Kehidupan Beragama Dan Sosial Langkung Sae  (Mewujudkan 1 Desa 1 mesjid Modern/Terpadu)



	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi penyusunan proses bisnis</li><li>- Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi</li><li>- Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</li><li>- Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</li></ul>	<b>Program Unggulan :</b> Reformasi Birokrasi Langkung Sae SPBE Langkung SAE  Majalengka Kota Cerdas berbasis SPBE Langkung Sae
--	---	---	--	---



## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### 4.2.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

Dalam rangka Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penyusunan IKU ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menekankan pentingnya keterukuran, relevansi, serta konsistensi indikator dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Indikator Kinerja Utama yang disusun dalam Renstra ini dirancang untuk menggambarkan capaian kunci yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode lima tahun ke depan. Setiap IKU ditetapkan melalui proses identifikasi yang cermat terhadap mandat organisasi, analisis terhadap kebutuhan pembangunan daerah, serta memperhatikan harmonisasi dengan dokumen perencanaan lain, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, setiap indikator yang dipilih memiliki relevansi yang kuat terhadap outcome pembangunan yang ingin dicapai, dan mampu mengukur kemajuan secara objektif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2026 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) yang merupakan cerminan dari penguatan kebijakan nasional menuju transformasi digital yang lebih holistik dan berorientasi pada hasil. Pemdi menggantikan pendekatan lama SPBE yang fokus pada kebijakan dan kapabilitas TIK saja. Sedangkan Pemdi merupakan instrumen evaluasi kinerja transformasi digital pemerintah yang menilai tidak hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kinerja, implementasi, dampak, dan kepuasan pengguna layanan digital. Perubahan ini didorong oleh visi jangka panjang negara, khususnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana sasaran utama tata kelola adalah Transformasi Digital Pemerintah. Secara umum,



Indeks Pemdi akan menjadi penguatan kebijakan SPBE dengan fokus yang lebih mendalam pada layanan publik terpadu dan teknologi modern.

Penyusunan IKU juga mempertimbangkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), sehingga setiap indikator memiliki kejelasan dalam pengukuran, target capaian yang realistis, relevansi terhadap mandat organisasi, serta batas waktu pencapaian yang terukur. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di bidang komunikasi, informatika, statistik dan Persandian.

Melalui perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan evaluasi berkelanjutan akan menjadi kunci utama dalam mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)/	Nilai	3,50	3,70	4,20	4,30	4,40	4,50	Indeks SPBE beralih (di konversi ke Indeks Pemdi per Tahun 2026)
	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai		1,50	1,50	1,80	1,80	2,00	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Nilai	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,75	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	
4	Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	Nilai	505	510	515	520	525	530	



#### 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Dalam rangka memperkuat sistem pengukuran kinerja serta memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Penyusunan IKK ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan pentingnya penyusunan indikator yang mampu mengukur secara tepat pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dengan fokus pada keluaran (output), hasil (outcome), maupun manfaat (impact) yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam proses penyusunannya, IKK mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), serta mempertimbangkan relevansi terhadap tugas dan fungsi organisasi, keterukuran capaian, dan kemudahan verifikasi data. Dengan demikian, indikator yang ditetapkan mampu menjadi instrumen evaluasi kinerja yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap Indikator Kinerja Kunci dalam Renstra ini dipadukan secara integral dengan sistem perencanaan dan penganggaran, serta menjadi bagian penting dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Melalui keberadaan IKK yang jelas dan terukur, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengidentifikasi secara dini potensi penyimpangan, mengoptimalkan pencapaian target, serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program dan kegiatan. IKK juga menjadi acuan utama dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta evaluasi kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Dengan landasan tersebut, penetapan Indikator Kinerja Kunci dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029 diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan mandatnya. Pada akhirnya, penyusunan dan pencapaian IKK akan mendukung terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang berkualitas, berkelanjutan,



serta adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A-	A-	A	A	A	A	
2	Presentase Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik dalam Menyusun perencanaan Pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik dalam Melakukan evaluasi Pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Presentase Nilai Per Area Keamanan Informasi Kabupaten	Persen	78,29	79,07	79,84	80,62	81,40	82,17	
5	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	90	90	100	100	100	100	
6	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	5	16	40	60	80	100	
7	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	0	8	14	17	60	100	
8	Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik	Lokasi	0	31	57	70	236	413	



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tujuan menjamin keselarasan antara perencanaan strategis perangkat daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Selain itu, penyusunan ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Melalui dokumen Renstra ini, telah dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah urusan bidang Komunikasi dan Informatika. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) dilakukan secara hati-hati dan terukur agar dapat menjadi alat ukur yang jelas dan objektif dalam menilai pencapaian kinerja Dinas selama periode perencanaan.

Renstra ini diharapkan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga penyusunan laporan kinerja. Renstra ini juga dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan operasional tahunan seperti Rencana Kerja (Renja) Dinas, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dijadikan rujukan dalam penetapan Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan Rencana Strategis ini.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029